

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap daerah di Indonesia memiliki otonomi mengatur pemerintahan. Otonomi daerah yaitu bentuk kegiatan mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagaimana antisipasi terhadap berbagai tuntutan perubahan tata negara baik secara sosial maupun politik yang berasal dalam negeri dan luar negeri. Pelaksanaan Otonomi daerah bertujuan untuk mendorong peningkatan kemandirian daerah dalam aspek fiskal, sehingga mengurangi ketergantungannya pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Otonomi daerah tersebut memberi kewenangan terhadap pemerintah agar mengelola urusan mereka sendiri, dalam hal sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana yang memadai. (Ariyanti, Setiawan, & Cahyati, 2020)

Pajak dibagi dua klasifikasi yaitu pajak pusat serta daerah. Kedua hal itu tidak sama karena sulit dibandingkan oleh wajib pajak. Pajak pusat yaitu yang berasal dari pusat negara yang dikelola atau berada dibawah naungan pemerintah pusat Direktorat Jenderal Pajak memainkan peran penting berbagai keperluan termasuk mendanai pengeluaran rutin negara. Pajak daerah merupakan bujet pemerintah yang didapat dari iuran masyarakat daerah yang diatur oleh pemda. Semakin banyak penerimaan sumber pendapatan yang diperoleh, maka realisasi pajak daerah cenderung semakin

meningkat. Pajak salah satu penerimaan dana negara untuk membiayai pembangunan daerah di Indonesia. Fungsinya untuk membiayai pengeluaran rutin, pembangunan, alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan di bidang keuangan pemerintahan. Sedangkan pajak daerah yaitu yang pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah serta digunakan untuk membiayai pengeluaran, pembangunan tingkat daerah itu sendiri. Peran atau fungsinya untuk pembangunan kebutuhan yang pendapatan dananya berasal dari pajak daerah sendiri. Anggaran yaitu suatu alat yang dirangkai secara tersusun untuk memenuhi, merencanakan, dan mengendalikan suatu kelompok organisasi. Sedangkan Anggaran dalam sektor publik adalah dokumen penting yang menggambarkan rencana keuangan suatu instansi pemerintah untuk periode tertentu. Dalam dokumen ini, semua kegiatan organisasi yang berkaitan dengan penghasilan atau pendapatan belanja diuraikan dalam komoditas ekonomi. Bujet menjadi panduan operasional manajemen keuangan bagi organisasi, sekaligus alat pengawas dan evaluasi terhadap kinerja keuangan instansi yang bersangkutan. Realisasi anggaran perlu dikaji ulang memastikan apakah alokasi dana telah digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dengan perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat keefektifitasan dan keefisienan operasi. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) berfungsi sebagai alat ukur utama dalam menilai bagaimana keuangan daerah dikelola. DPA-PD mencakup rincian

anggaran yang direncanakan, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan audit dan evaluasi keuangan, untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik. (Budiana & Saidi, 2020)

Penerimaan pajak hotel didapat dari kepatuhan wajib pajak. Pengaruh salah satunya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu permasalahan dalam negara dengan adanya aturan penerapan sistem perpajakan. Sistem perpajakan mekanisme *Self Assessment* yang sering diterapkan pada pajak daerah, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak daerah untuk menilai dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Dengan kata lain memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, bayar, dan melaporkan pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Masalah kepatuhan wajib pajak tantangan global yang dihadapi hampir seluruh dunia dari negara maju maupun negara berkembang. Kurangnya kepatuhan tersebut akan mendorong mereka mencari cara-cara untuk menghindari kewajiban perpajakan, baik itu dengan cara yang legal maupun ilegal. Tindakan-tindakan seperti penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan kelalaian pembayaran pajak memang dapat menyebabkan penurunan pendapatan penerimaan negara dari aspek perpajakan menjadi berkurang secara signifikan dan pajak Daerah akan berkurang. (Agita & Noermansyah, 2020)

Pemerintah daerah memiliki beberapa jenis pajak yang dipungut salah satunya yaitu pajak hotel. Kali ini permasalahan yang saya ambil yaitu

mengenai penerimaan pajak hotel pada pemerintah Kota Pekalongan yang sumber penghasilannya dari penghasilan hotel sendiri. Pajak hotel kekuatannya sangat besar yang dapat dikembangkan. Waktu demi waktu kemajuan zaman yang serba canggih dengan mudahnya semua bisa diakses melalui gadget yang kita gunakan sehari-hari maka kota besar nampak kehilangan destinasi wisatanya. Dari sini Kota kecil maupun daerah kecil bisa mengembangkan keahlian daerah. Menurut penelitian terdahulu penerimaan pendapatan pemerintah tentang pajak hotel di daerah Jawa Tengah tahun 2019-2020 mendapati peningkatan, jika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 akan diturunkan dari nilai Rp 14,6 triliun ketika penerimaan tersebut terletak saat hasil pajak daerah mengalami perbandingan dengan komponen diterimanya Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD, data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, sektor perhotelan di wilayah ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Tercatat sebanyak 1.374 hotel beroperasi di Jawa Tengah, dan jumlah ini cenderung terus bertambah. Seiring dengan meningkatnya jumlah hotel, pendapatan daerah dari pajak hotel juga ikut mengalami peningkatan. Ketentuan Pasal 94 Undang-undang No 1 tahun 2022 sebagaimana tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat serta Pemerintah daerah Kota Pekalongan tentang retribusi dan pajak daerah. Jasa perhotelan yaitu bisnis yang menyediakan tempat menginap dan berbagai layanan tambahan. (Arviyana, 2022)

Menurut salah satu data dari Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan jenis hotel klasifikasinya mulai dari kamar melati hotel berbintang satu sampai bintang empat. Klasifikasi tersebut hotel berbintang memiliki kriteria antara lain 1. Besar atau kecilnya jumlah kamar yang dipesan, 2. Lokasi, 3. Fasilitas hotel yang dipesan, 4. Kelengkapan peralatan yang didapat, 5. Tingkat pendidikan karyawan, 6. Kualitas bangunan yang memadai, dan yang terakhir 7. Model tata letak ruangan.

Data yang bersumber dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan jumlah Hotel dan Penghasilan Pajak Hotel Kota Pekalongan pada 2019-2023. Bisa dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Realisasi dana penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan (2019-2023)

Tahun	Realisasi penerimaan Pajak Hotel
2019	7.437.962.444
2020	4.964.675.637
2021	6.246.739.193
2022	7.407.500.272
2023	6.969.164.821

Sumber : Data BPKAD Kota Pekalongan

Dari tabel tersebut terjadi fluktuasi menurunnya penerimaan pajak hotel Kota Pekalongan tahun 2020 serta 2023. Pendapatan pajak hotel

tahun tersebut sempat terjadi penurunan disebabkan dampaknya pengaruh Covid-19. Masuknya Covid-19 di wilayah Indonesia terutama Daerah Kota Pekalongan, menyebabkan adanya beberapa pembatasan pelaksanaan aktivitas perekonomian. Dimana pemerintah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM), *Social Distancing*, *Physical Distancing*, dan Pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut PSBB maka Wisatawan ataupun tamu yang menginap menjadi sepi. Begitupun tahun 2023 menurunnya pendapatan dana yang diperoleh pajak hotel sebab dikarenakan adanya si wajib pajak yang kurang patuh dengan adanya pajak hotel serta jumlah Penghasilan yang tidak diimbangi dengan pembangunan hotel yang ada di Kota Pekalongan, maka berdampak penurunan dana yang diterima pajak hotel yang berimbas kepada Penghasilan Asli Daerah atau biasa disebut PAD.

Efektivitas merupakan keberhasilan usaha atau tindakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Makin besar kontribusi sebuah unit terhadap pencapaian tersebut, semakin berpengaruh kinerjanya yang dicapai sebuah unit. (Pingkan Eunike, Sondakh, & Gerungai, 2022)

Tabel 1.2 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif

<60%	Tidak Efektif
------	---------------

Sumber : Kemendagri, Nomor 47 Tahun 1999

$$\text{Efektivitas pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}$$

Analisis kontribusi merupakan suatu cara yang dilakukan seberapa jauh untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diterima dan nantinya dapat diberikan atau disumbangkan dari penerimaan pajak hotel kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. Gambarannya ketika kontribusi yang diberikan dalam jumlah besar maka akan semakin baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. dengan demikian ketika kontribusi yang diberikan dalam jumlah sedikit yang terjadi pada pendapatan yaitu kurang baik. (Arviyana, 2022)

Tabel 1.3 Interpretasi Kriteria Kontribusi Pajak Hotel

Presentasi	Kriteria
0.00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,19%-40%	Cukup Baik
40%,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 47 Tahun 1999

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Jumlah Realisasi PAD}}$$

Pajak hotel sangat berpengaruh dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan, penulis menjadi tertarik mengarang kajian dengan judul “**Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2023**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan terjadi rumusan masalah yang diambil oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun penyusunan tujuan tugas akhir ini antara lain :

1. Mengetahui tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.
2. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.

1.4 Kegunaan Tugas Akhir

1. Bagi penulis

Tugas Akhir menjadi syarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas

Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Untuk mengukur kemampuan sejauh mana mahasiswa memahami dan mengimplementasikan mata kuliah yang sudah dipelajari selama di bangku perkuliahan terutama yang berhubungan dengan penelitian yang diambil yaitu perpajakan dan Akuntansi Publik.

2. Bagi Instansi

Menjadikan gambaran informasi yang benar sesuai dengan data agar dapat meningkatkan kinerja instansi dan memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di lapangan.

3. Bagi Akademik

Dapat menjadi informasi, referensi yang akan melakukan penelitian, menambah literatur pada kampus, serta meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Diploma III Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

1.5 Metode Tugas Akhir

Penelitian yang diambil oleh penulis yaitu menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan berada di Jalan Sriwijaya No. 44, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Jawa Tengah

1.5.2 Jenis Data

Penulis mengambil data yang digunakan untuk penelitian merupakan teknik wawancara pada bagian pengawasan objek penelitian seperti penerimaan pajak hotel, dan dokumen-dokumen yang terkait untuk penelitian.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam analisis penelitian berasal dari:

1. Data Primer, merupakan data berasal dari narasumber secara langsung tanpa perantara dalam bentuk wawancara kepada orang-orang yang bersangkutan serta dokumen-dokumen yang diperlukan.
2. Data Sekunder, yaitu data tersebut yang sumber asalnya bisa dari jurnal, internet, dan sebagai referensi maupun kajian pustaka

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut sistem penulisan dalam penelitian Tugas Akhir memiliki gambaran umum antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian awal ini mencakup dan menggambarkan tentang objek penelitian antara lain di dalamnya mencakup Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, metode tugas akhir, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memberikan sumber terhadap penelitian yang sedang berjalan dengan membahas teori-teori terkait.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bagian ketiga dalam Tugas Akhir di dalamnya mencakup dan membahas sejarah umum instansi, tujuan instansi, visi dan misi instansi serta hal yang memiliki kaitannya dengan tujuan dan tugas umum instansi. Tujuan bab ketiga yaitu memberikan mengenai objek yang diambil.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian keempat dalam tugas akhir yang memiliki bahasan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah dengan kajian yang dilakukan penelitian yang sesuai metodologi penulisan.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir yaitu ke lima bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang didapat dari rumusan masalah dan diperoleh ketika melakukan penelitian. Dan saran tentang solusi masalah yang didapat selama melakukan penelitian yang bisa memberikan nilai kurang baik menjadi baik.